

**PENGARUH BELANJA DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN  
Di KABUPATEN CILACAP**

**PERIODE TAHUN 2011 – 2016**

**(Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 - 2016)**

**Riko Tri Fasholla**

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

e-mail : [rtfasholla96@gmail.com](mailto:rtfasholla96@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kabupaten Cilacap mempunyai struktur perekonomian yang sangat beragam, mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani, pedagang dan nelayan. Di lihat dari segi perekonomian, pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Cilacap. Tetapi dengan beragam sektor yang ada masih banyak terdapat penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 2) Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 3) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 4) Menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara data time series dan data cross section dari tahun 2011 hingga 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan, Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan, Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap Jumlah Kemiskinan dan secara bersama-sama ketiga variabel Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap tahun 2011-2016.

Kata Kunci : Jumlah Kemiskinan, Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah.

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

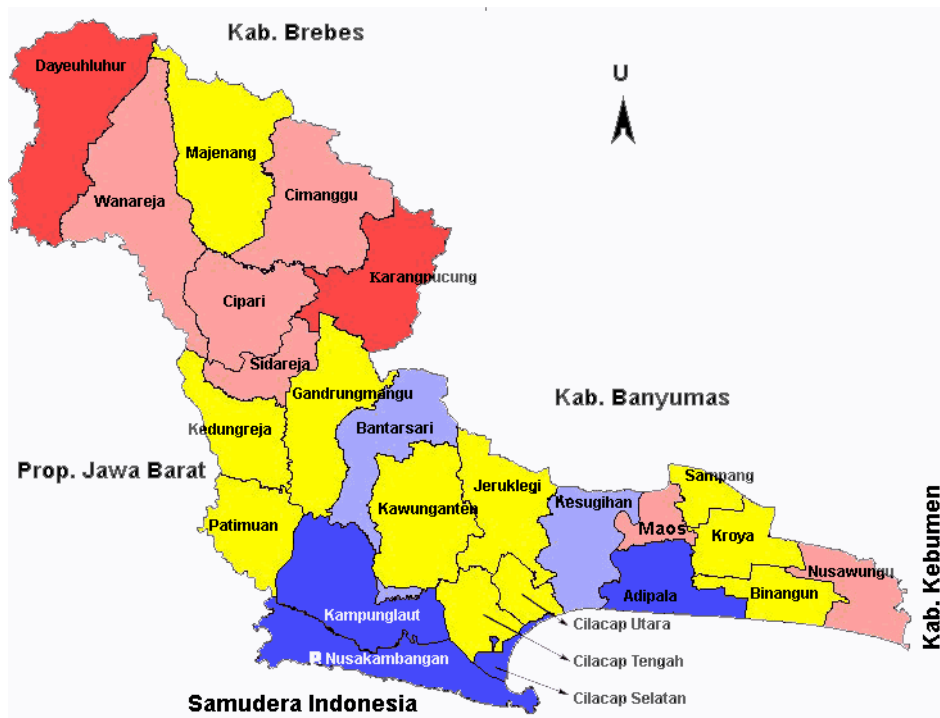
Salah satu pokok permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang khususnya di Indonesia dan daerah-daerah didalamnya yaitu masalah kemiskinan, menjadi permasalahan umum di berbagai daerah, kemudian pada topik-topik pembicaraan dan diskusi yang marak diangkat juga sebagai tema pokok permasalahan pembicaraan dimanapun. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah jumlah penduduk yang semakin meningkat, semakin bertambahnya jumlah pengangguran, serta kesehatan dan pendidikan yang tidak memungkinkan untuk menambah tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang yang dikategorikan miskin yang sangat berkaitan erat dengan masalah kemiskinan tersebut. Untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan pendekatannya harus masuk dalam ruang lingkup sektor, lintas pelaku secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional.

Kondisi kemiskinan yang semakin membelenggu sebagian besar masyarakat kita hingga kini masih menyimpan banyak perdebatan. Perdebatan terutama mengenai seputar konsep, teori serta metode-metode yang menyangkut tentang kondisi kemiskinan di sekitar kita. Perdebatan dimulai dengan penyusunan indikator, konsep, serta langkah-langkah yang harus diambil begitu juga dengan bagaimana cara mengatasinya, atau dengan bahasa praktisnya penanggulangan kemiskinan supaya semakin berkurang. Hal ini menjadi semakin kontras, tatkala pihak-pihak yang mengalami atau berada dalam 'lingkaran kemiskinan' terus bertambah jumlahnya.

### **Gambar 1**

#### **Peta Kabupaten Cilacap**

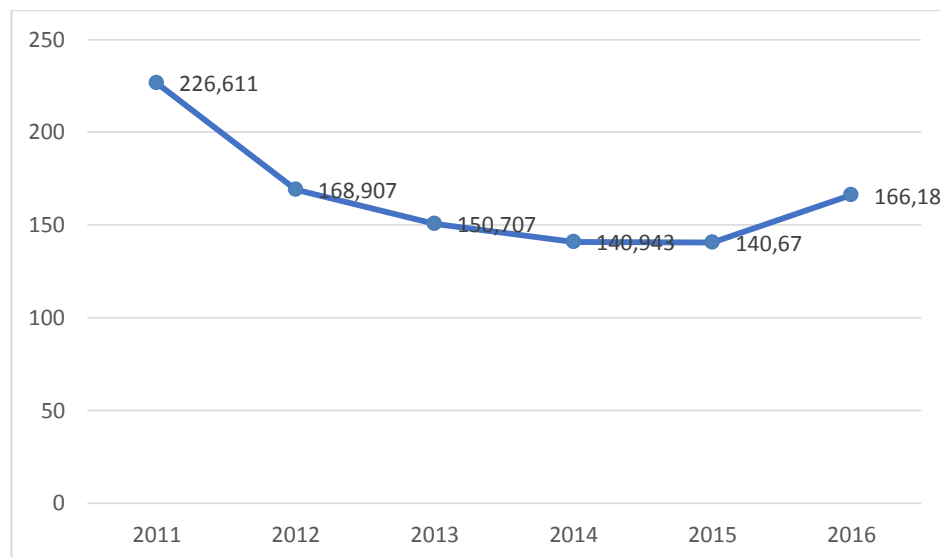


Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatannya adalah Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Cilacap adalah 225.360,84 Ha atau 6,94% dari luas Provinsi Jawa Tengah termasuk Pulau Nusakambangan dengan luas 11.510,522 Ha dan terletak diantara  $108^{\circ}4-30^{\circ}$  -  $109^{\circ}30^{\circ}30^{\circ}$  garis Bujur Timur dan  $7^{\circ}30^{\circ}$  -  $7^{\circ}45^{\circ}20^{\circ}$  garis Lintang Selatan. Luas wilayah tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah seluas 62.261,286 Ha (29,11%) dan lahan kering atau bukan lahan sawah seluas 150.787,911 Ha (70,89%). Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan dengan 284 desa/kelurahan.

Topografi wilayah Kabupaten Cilacap meliputi daerah rawa-rawa hingga daerah perbukitan, dengan ketinggian dari permukaan laut terendah adalah 6 meter di kota Cilacap dan tertinggi 198 m di Dayeuhluhur. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km yaitu dari wilayah Kecamatan Dayeuhluhur sampai ke wilayah Kecamatan Nusawungu, sedangkan dari utara ke selatan sepanjang 35 Km yaitu dari wilayah kota Cilacap ke wilayah Kecamatan

Sampang. Dengan keadaan alam yang demikian mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani, pedagang dan nelayan. Di lihat dari segi perekonomian, pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Cilacap. Subsektor nelayan digeluti sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai selatan. Cilacap adalah satu dari tiga kawasan industri utama di Jawa Tengah (selain Semarang dan Surakarta). Sektor perikanan laut masih harus banyak digali dan dimaksimalkan, karena potensinya yang begitu besar masih belum banyak tersentuh dan sebaiknya investasi diarahkan untuk mengembangkan potensi tersebut.

**Gambar 2**  
**Jumlah Kemiskinan ( ribu jiwa) Kabupaten Cilacap**  
**Tahun 2011-2016**



Gambar 2 menjelaskan jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Cilacap tahun 2011-2016. Jumlah kemiskinan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 220.611 jiwa, kemudian pada tahun 2015 jumlah kemiskinan yang paling rendah yaitu sebesar 140.670 jiwa. Sedangkan secara keseluruhan dari tahun 2011-2015 jumlah

kemiskinan selalu mengalami penurunan, tetapi berbanding terbalik pada tahun 2016 jumlah kemiskinan kembali meningkat meskipun tidak secara signifikan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Santoso (2013) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. Peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari data yang diperoleh dari BPS dan Direktorat Jendral Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2007-2010. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari peningkatan PAD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemungkinan kebijakan penarikan PAD memberatkan masyarakat, dan pungutan PAD yang diperoleh, serta penerimaan DAU dari pemerintah pusat tidak didukung oleh pengeluaran pemerintah yang tepat dan produktif serta menunjang untuk pertumbuhan ekonomi. Pengaruh DAK dan DBH terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah semestinya signifikan, sementara itu PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah. Sedangkan DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah

Firdaus (2011), dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan di Sulawesi periode 2006-2010. Peneliti menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi data panel. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan, yang artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah. Variabel pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan signifikan, berarti semakin tinggi pengangguran terbuka maka jumlah penduduk miskin akan mengalami kenaikan. Variabel banyaknya murid SD Negeri (APS) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan yang mempengaruhi kemiskinan. Hal ini karena angka

partisipasi sekolah kelompok usia menengah (13-15 tahun) tidak mempunyai pengaruh dalam penurunan kemiskinan. Data yang tidak signifikan menandakan bahwa angka partisipasi sekolah tidak mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tidak signifikannya angka harapan hidup disebabkan karena angka harapan hidup di Sulawesi masih rendah.

Hendra (2010) penelitian ini membahas tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kalimantan Timur”. Peneliti menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi data panel. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel lulusan SMA/SMK mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dimana semakin tinggi PDRB maka jumlah kemiskinan juga akan meningkat.

Hasil penelitian Iskana (2009) pada penelitian tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur menjelaskan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Setiyawati (2007) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh PAD, DAU, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menemukan hasil penelitian bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dihimpun oleh pihak lain dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel yaitu gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, BPPKAD Kabupaten Cilacap (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), Studi pustaka yaitu dengan mempelajari teori dari buku dengan melakukan analisis perbandingan yang sesuai dengan penelitian ini, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Pada penelitian tentang Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 – 2016 ini membahas dua variabel, yaitu variable dependen (variable terikat) serta variabel independen (variabel bebas). Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Belanja Daerah sebagai  $X_1$ , Jumlah Penduduk sebagai  $X_2$ , serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai  $X_3$ . Sementara yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Jumlah Kemiskinan sebagai (Y) di Kabupaten Cilacap. Alat analisis yang digunakan dalam pengolahan data yaitu menggunakan bantuan program *Eviews 9.0*. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_{1\text{Log}}X_{1it} + \beta_{2\text{Log}}X_{2it} + \beta_{3\text{Log}}X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y : Jumlah Kemiskinan (satuan jiwa)
- X1 : Belanja Daerah (milyar rupiah)
- X2 : Jumlah penduduk (satuan jiwa)
- X3 : Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)



- e : variabel pengganggu/residual (error)
- i : Observasi
- t : Waktu (Tahun)
- $\beta_0$  : Koefisien Intersep

Data panel dianalisis dengan menggunakan tiga model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Dari ketiga model tersebut, maka dapat dilakukan pengujian pertama untuk memilih model yang layak digunakan antara model *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dengan menggunakan uji Chow. Jika hasil uji chow ini signifikan (F-statistik > F-hitung atau P-value <  $\alpha$  0.05) maka model *Fixed effect* yang layak digunakan yang digunakan dan dilanjutkan ke model *Random Effect*, dan jika hasilnya tidak signifikan (F-statistik < F-hitung atau P-value >  $\alpha$  0.05) maka model yang layak digunakan yaitu *Common Effect* dan tidak perlu dilanjutkan ke model *Random Effect*.

Pengujian selanjutnya yaitu menguji antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model yang layak digunakan dalam estimasi akhir. Jika hasil uji Hausman signifikan (chi-sq statistik > chi-sq tabel atau P-value <  $\alpha$  0.05) maka model yang layak digunakan yaitu *Fixed Effect*, dan jika hasil uji hausman tidak signifikan (chi-sq statistik < chi-sq tabel atau P-value >  $\alpha$  0.05) maka model yang layak digunakan yaitu *Random Effect*.

Selain menggunakan tiga model analisis diatas, peneliti juga melakukan pengujian statistik diantaranya yaitu Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F-statistik), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji t-statistik). Atas dasar beberapa uji yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman, maka model *Fixed Effect* merupakan model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu *Fixed Effect Models*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tabel 1**

## Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section and period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.384772	(23,112)	0.0000
Cross-section Chi-square	205.252461	23	0.0000
Period F	12.542255	(5,112)	0.0000
Period Chi-square	64.027565	5	0.0000
Cross-Section/Period F	15.425096	(28,112)	0.0000
Cross-Section/Period Chi-square	227.559093	28	0.0000

Dapat dilihat dari uji F diatas, nilai *Cross-section F statistic* sebesar 15.384772 dan nilai *Cross-section Chi-Square statistic* sebesar 205.252461. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa *Cross-section Chi-Square statistic* = 205.252461 > *Cross-section F statistic* = 15.384772. Ketika *Chi-Square* lebih besar dari *Cross-section F statistic* maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Artinya, model *fixed effects* lebih baik digunakan dibandingkan dengan model *common effect*. Maka langkah pengujian yang selanjutnya adalah membandingkan antara model *random effect* dengan *fixed effect*.

**Tabel 2**

### Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section and period random effects

Test Summary	Chi-Sq.	Chi-Sq. d.f.	Prob.
--------------	---------	--------------	-------

	Statistic		
Cross-section random	0.000000	3	1.0000
Period random	0.000000	3	1.0000
Cross-section and period random	13.222395	3	0.0042

Dapat dilihat dari uji Hausman diatas, nilai *Cross-section random statistic* sebesar 0.000000. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa *Cross-section Chi-Square statistic* = 205.252461 > *Cross-section random* = 0.000000. Ketika *Cross-section Chi-Square* lebih besar dari *Cross-section random* maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  . Artinya, *fixed effects* model lebih baik digunakan dibandingkan dengan *random effect* model. Dengan demikian, estimasi yang selanjutnya dilakukan yaitu menggunakan model *fixed effect*.

**Tabel 3**  
**Hasil Estimasi *Fixed Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.78318	37.34997	-1.975455	0.0507
LOG(X1?)	0.493557	0.295102	1.672496	0.0972
LOG(X2?)	6.674062	3.305715	2.018947	0.0459
LOG(X3?)	-0.002235	0.053346	-0.041905	0.9666
Fixed Effects (Cross)				
_CS—C	-0.413092			
_CT—C	0.492822			
_CU—C	-21.18345			
_JL—C	-0.898283			
_KWT—C	10.61520			
_BTS—C	0.156946			

_KSG—C	0.027772
_ADP—C	3.326100
_MAOS--C	4.313099
_SPG—C	-2.386567
_KRY—C	1.599757
_BNG—C	0.275802
_NSW—C	0.309437
_SDJ—C	0.109311
_KDJ—C	3.694491
_GDM—C	1.468617
_PTM—C	-1.820375
_CPR—C	2.139494
_KRP—C	1.833207
_CMG—C	1.057359
_MJG—C	-0.685836
_WNJ—C	-2.875699
_DYL—C	-1.530145
_KPL—C	0.374040

Fixed Effects (Period)

1—C	0.565963
2—C	0.153221
3—C	0.006429
4—C	-0.201434
5—C	-0.309171
6—C	-0.215010

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

---



---

R-squared	0.848108	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.806066	S.D. dependent var	0.507018
S.E. of regression	0.223280	Akaike info criterion	0.032350
Sum squared resid	5.583646	Schwarz criterion	0.692309
Log likelihood	29.67079	Hannan-Quinn criter.	0.300520
F-statistic	20.17308	Durbin-Watson stat	1.769693
Prob(F-statistic)	0.000000		

Seperti yang tertera pada tabel 3, didapatkan angka koefisien determinasinya ( $R^2$ ) sebesar 0.848108 atau 84,81%. Artinya sebesar 84,81% variabel independen yaitu Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Jumlah Kemiskinan. Sementara sisanya sebesar 15,19% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini. Dapat kita ketahui hasil perhitungan pada model *Fixed Effect* diperoleh nilai *Probabilitas (F-statistic) = 0.000000 < alfa = 0.05*, maka menolak  $H_0$ . Hal ini berarti Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, serta Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, diketahui bahwa nilai *Probabilitas t-statistic* dari variable Belanja Daerah sebesar 0.0972, lebih kecil daripada nilai *alfa* 0.1 yang berarti bahwa Belanja Daerah di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Dengan kata lain, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak.

Berarti sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iskana (2009) yang mengatakan bahwa pada penelitian tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur menjelaskan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Dengan demikian, dalam pengujian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Belanja Daerah di tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Jumlah Kemiskinan untuk tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap akan meningkat juga, sehingga hubungan antara Belanja Daerah dengan Jumlah Kemiskinan positif.

Diketahui bahwa nilai *Probabilitas t-statistic* dari variabel Jumlah Penduduk sebesar 0.0459, lebih kecil daripada *alfa* 0.05 yang berarti bahwa Jumlah Penduduk di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Dengan kata lain, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan metode panel data mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dengan kemiskinan. Selain itu, Todaro (2000) mengemukakan bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut dibuktikan dalam perhitungan

indeks *Foster Greer Thorbecke* (FGT), yang mana jika jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Jumlah Penduduk dari tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap juga akan meningkat.

Kemudian hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, diketahui bahwa nilai *Probabilitas t-statistic* dari variable Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.9666, lebih besar daripada nilai *alfa* 0.05 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap tidak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Dengan kata lain, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima.

Berarti sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansyah (2015) yang mengatakan bahwa semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh masyarakat maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi berbagai kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hidupnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang terkait serta analisisnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Hal ini berarti ketika Belanja Daerah di tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Jumlah Kemiskinan untuk tiap kecamatan di

Kabupaten Cilacap akan meningkat juga sehingga hubungan antara Belanja Daerah dan Jumlah Kemiskinan positif. Dengan begitu perlu adanya peraturan atau regulasi yang ketat dari Pemerintah untuk setiap Belanja Daerah agar setiap pengeluaran tersebut tepat sasaran dan digunakan untuk kegiatan yang produktif semisal pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Dengan langkah tersebut diharapkan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap akan menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

2. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Jumlah Penduduk dari tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat juga. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan metode panel data mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dengan kemiskinan. Menunjukkan perlu adanya langkah yang tegas dari Pemerintah mengenai pertumbuhan Jumlah Penduduk yang semakin bertambah, yakni dengan cara mencanangkan program KB (Keluarga Berencana), serta undang-undang tentang perkawinan untuk mengatur usia minimal seseorang untuk menikah. Dengan langkah tersebut diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap dan juga dapat menekan angka kemiskinan.
3. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pada hasil analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap. Berarti ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Jumlah Kemiskinan akan menurun, dan sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah menurun maka Jumlah Kemiskinan akan



meningkat tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap. Karena perlu adanya peningkatan kinerja pada sektor unggulan di Kabupaten Cilacap, antara lain di sektor perikanan, sektor pertanian dan sektor industri. Dimana ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap. Sehingga dengan adanya ketiga sektor tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Cilacap.

4. Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober 2003.
- Astika, Ketut Sudhana. 2010. *Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1 No.01. Universitas Udayana. Bali.
- Baltagi. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition. John Wiley & Sons.
- Bastian Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1 Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus, A (2011). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sulawesi periode tahun 2006-2011”*. Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia

- Firmansyah, Andy Kurniawan dkk. 2015. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012”*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ). Jember, Jawa Timur.
- Iskana, Ida. 2009. *Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran*, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Junaidi, Delis dan Devita. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol.2. No.2. Hal. 63-70.
- Kartasamita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 1 (ayat 13).
- Ritonga, Taufiq I. (2009), *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Said, Hendra. 2010. *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kalimantan Timur”*.
- Santoso, Budi (2013). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2010*, Skripsi Fakultas Universitas Mataram.
- Setiawan, Anjar. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Studi Pada Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setiyawati, Hamzah (2007) yang berjudul *“Analisis Pengaruh PAD, DAU, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah. Universitas Trunojoyo.

Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2007. “*Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*”, IPB dan Brighten Institute.

Sugiyono. (2011), *Metode Penelitian Kombinasi* hal: 60. Bandung: Alfabeta.

Suryati, Desi. 2015. *Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012*. Jurnal Ilmiah Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Vol.9 No.7. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.

Sriyana, Jaka. (2014). *Metode regresi data panel (Dilengkapi analisis kinerja Bank Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: Ekonisia

Todaro, Michael P, (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, *Tentang Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 Tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work fpr the Poor*. The World Bank.